

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1987. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- A. Mukhtie Fadjar, 2003. *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-TRANS, Malang.
- Anwar Saiful, 2004. “*Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*”, Glora Madani Press, Jakarta.
- A. Hamid Attamini, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 25 April 1992, Jakarta.
- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004, *Membongkar Dosa-dosa Pemilihan Umum*, Prisma Media, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia. Jakarta.
- Abdullah Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Agus Pramusinto,dkk. 2015. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Abdul Gafar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ayu Widowati Johannes. 2020. *Pilakada Mencari Pemimpin Daerah*. Cendikia Press. Jakarta.
- Amal B. 2018. *Hukum dan Masyarakat*. Thafa Media. Jakarta.
- Adji, O. S. 1987. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga. 1987. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung.
- Dahl, Robert A, 2001, *Perihal Demokrasi Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- Daniel Solosa, 2005, *Pilkada Langsung*, Media Presindo, Jakarta.
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta.
- Frank McLoughlin, 2016. *Prioritizing Justice Electoral Justice in Conflict-Affected Countries and Countries in Political Transition*, Stockholm.
- Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung.
- Haris Syamsuddin (Editor). 2020, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H Iriyanto A. Baso Ence, 2008. *Negara hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- I. Dewa Gede Atmadja, 2012. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Irvan Mawardi, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Rangkang Education, Jakarta.
- IDEA. 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilihan Umum*. IDEA. Sweden.
- IDEA, 2010. *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, Stockholm.
- John Salindeho, 1998. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Joko J Prihatmoko, 2005, “*Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joko Prihatmoko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika. Jakarta.
- JJ. H. Bruggink Alih Bahasa B.Arief Sidharta, 2001. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

- L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Maruarar Dkk. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. Badan Pembangunan Hukum Nasional: Jakarta.
- Miriam Budirjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995. *Pemantapan cita hukum dan asas hukum nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.
- Patrick Merloe, 1994. *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat.
- Philipus M. Hadjon, 1994. *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (makalah). Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2008. *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prayudi Atmosudirjo, 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghlmia Indonesia. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT.Grasindo, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, dkk. 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta : kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 2011, Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni. Bandung.
- SF Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Suharizal. 2012. *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sjachran Basah, 1986. *Menelaah Liku-Liku RUU tentang PTUN*, Alumni, Jakarta.
- Sarjono Soekanto, 1990. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahrial Syarbaini, dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Ghmia Indonesia, Jakarta.
- Topo Santoso, dkk, 2006. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Jakarta.
- Oliver Joseph, & McLoughlin, Frank, 2019 *Electoral Justice System: Assessment Guide*, Stockholm.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- Agus Hadiawan, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung, Universitas Lampung, Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009.
- Andrizal. Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016. Universitas Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 151 – 169. Pekanbaru.
- Akhrul Amal. 2019. Masalah-Masalah Hukum, *Jurnal Hukum* Jilid 48 No.3, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia. Surabaya.
- Bakhrul Amal. Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilihan Umum Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Masalah-Masalah Hukum, *Jurnal* Jilid 48 No.3, Juli 2019, P-Issn : 2086-2695, E-Issn : 2527-4716. Universitas Nahdatul Ulama Indonesia. Surabaya.
- Harjono dkk. 2018. *Jurnal ETIKA & PEMILU*. Vol. 4, Nomor 1-Juni 2018. Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1994 . Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6 Tahun IX, November – Desember 1994. Surabaya.

Paulus Effendie Lotulung, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Jurnal Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, Indonesia. Jakarta.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

_____.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

_____.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

D. Web

Kalsel.Bawaslu Prov. Go.id

Pn-Gunungsitoli.Go.id

kbbi.web.id/adil.